

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan agar mengidentifikasi pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel GDP, FDI, *Trade*, tingkat bunga riil, nilai tukar efektif, dan remitansi pribadi terhadap penerimaan pajak di negara berkembang sepanjang jangka waktu 2003-2022. Hasil analisis memperlihatkan bahwa GDP, FDI, *Trade*, nilai tukar efektif, dan remitansi pribadi memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sementara tingkat bunga riil tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya memfokuskan kebijakan pada variabel-variabel yang terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Implikasi dari penelitian ini menyarankan pemerintah di negara berkembang dapat menggunakan hasilnya sebagai referensi untuk merancang kebijakan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan arus masuk investasi asing, memperluas perdagangan internasional, dan mengelola remitansi secara efektif. Kebijakan yang dapat diterapkan meliputi pengembangan infrastruktur ekonomi untuk mendukung pertumbuhan GDP, pemberian insentif investasi yang menarik namun tetap adil secara fiskal, penyederhanaan regulasi perdagangan, dan penguatan sistem pengelolaan remitansi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan pajak.

Tindak lanjut dari temuan ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan perpajakan untuk memanfaatkan potensi basis pajak yang lebih besar, penyesuaian kebijakan moneter dan fiskal agar lebih selaras dalam mendukung stabilitas ekonomi, serta peningkatan koordinasi antarnegara untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan penerimaan fiskal nasional. Dengan memahami variabel-variabel yang signifikan ini, negara berkembang dapat menyusun strategi yang lebih terarah untuk memaksimalkan penerimaan pajak, di mana pada akhirnya bisa diterapkan untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan. Analisis pertama difokuskan pada negara berkembang sesuai dengan desain penelitian, sehingga hasilnya tidak mencakup dinamika penerimaan pajak di negara maju dan tidak dapat digeneralisasi secara global. Kedua, meskipun jumlah negara berkembang di dunia cukup banyak, penelitian ini mencakup 10 negara karena keterbatasan ketersediaan data yang konsisten dan valid. Hal ini dapat membatasi generalisasi hasil untuk keseluruhan negara berkembang. Ketiga, desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder yang tidak mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif, seperti dinamika sosial-politik, kepatuhan wajib pajak, atau persepsi publik terhadap sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi hasil. Selain itu, penggunaan GDP sebagai variabel dalam penelitian ini juga memiliki keterbatasan, karena GDP mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu,

diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana GDP dapat digunakan sebagai proksi yang lebih akurat dalam mengukur kesejahteraan. Terakhir, penelitian ini tidak secara spesifik membahas satu negara tertentu, sehingga tidak memberikan gambaran mendalam tentang penerapan kebijakan perpajakan atau dinamika ekonomi di suatu negara spesifik.

5.3 Saran

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mencakup analisis komparatif antara negara berkembang dan negara maju, yang memungkinkan identifikasi perbedaan pola penerimaan pajak serta eksplorasi lebih dalam terhadap faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak di berbagai konteks ekonomi. Selain itu, cakupan negara berkembang yang diteliti perlu diperluas dengan melibatkan lebih banyak negara, yang dapat dilakukan melalui pengumpulan data dari sumber yang lebih beragam atau dengan mengembangkan metode estimasi yang mampu mengatasi keterbatasan data, sehingga hasil penelitian lebih representatif untuk mencerminkan kondisi negara berkembang secara keseluruhan.

Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penambahan variabel *tax treaty* sebagai salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan pajak, mengingat perjanjian pajak bilateral dapat berdampak pada FDI serta strategi optimalisasi pajak yang diterapkan oleh perusahaan multinasional. Dengan memasukkan variabel ini, analisis diharapkan lebih komprehensif dalam mengidentifikasi dinamika kebijakan perpajakan di berbagai negara.

Selain itu, penggunaan GDP sebagai variabel dalam penelitian ini memiliki keterbatasan, karena GDP mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Oleh karena itu, penelitian di masa depan dapat mempertimbangkan indikator alternatif, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau tingkat kemiskinan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak.

Namun, untuk memahami lebih dalam bagaimana kebijakan perpajakan diterapkan dan direspons oleh berbagai pemangku kepentingan, pendekatan kualitatif, seperti wawancara dengan pembuat kebijakan, analisis laporan institusional, atau studi persepsi publik terhadap sistem perpajakan, juga penting untuk melengkapi pendekatan kuantitatif. Hal ini memungkinkan penelitian mengungkap pengaruh dinamika sosial-politik, kepatuhan wajib pajak, serta kualitas institusi terhadap penerimaan pajak.

Selanjutnya, penelitian kasus spesifik terhadap negara tertentu dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai penerapan kebijakan perpajakan atau dinamika ekonomi lokal, serta membantu mengidentifikasi praktik terbaik atau tantangan spesifik yang dapat menjadi rujukan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Dengan memperhatikan saran-saran ini, penelitian masa depan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak dan menghasilkan usulan kebijakan yang lebih tepat untuk berbagai kondisi ekonomi.